



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 – 4233347 – 4260963
Faksimil : (022) 4203450 Website : www.jabarprov.go.id e-mail : info@jabarprov.go.id
Bandung - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 188.54/Kep.218-Hukham/2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR
188.54/Kep.25-Hukham/2025 TENTANG PROGRAM PERENCANAAN
PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat untuk tahun 2025, telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.54/Kep.25-Hukham/2025 tentang Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tahun 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.54/Kep.145-Hukham/2025;
 - bahwa untuk mengakomodasikan kebutuhan regulasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam bentuk Peraturan Gubernur Jawa Barat, perlu dilakukan perubahan ketiga atas Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tahun 2025;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.54/Kep.25-Hukham/2025 tentang Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tahun 2025;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9E07A4DE00>

9E07A4DE00

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.54/Kep.25-Hukham/2025 tentang Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tahun 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.54/Kep.145-Hukham/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.54/Kep.25-Hukham/2025 tentang Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 188.54/KEP.25-HUKHAM/2025 TENTANG PROGRAM PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.54/Kep.25-Hukham/2025 tentang Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tahun 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.54/Kep.145-Hukham/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.54/Kep.25-Hukham/2025 tentang Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tahun 2025 diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.



KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 April 2025

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9E07A4DE00>

9E07A4DE00

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 188.54/Kep.218-Hukham/2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
JAWA BARAT NOMOR 188.54/Kep.25-Hukham/2025
TENTANG PROGRAM PERENCANAAN PENYUSUNAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2025

PROGRAM PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2025

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
1.	Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak di Daerah Provinsi Jawa Barat	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat
2.	Pengangkatan Anak	
3.	Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	
4.	<i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Provinsi Jawa Barat	
5.	Peraturan Internal (<i>Hospital By Laws</i>) pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
6.	Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital By Laws</i>) dan Peraturan Staf Medis Rumah Sakit (<i>Medical Staff By Laws</i>) pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Paru	
7.	Peraturan Internal (<i>Hospital By Laws</i>) pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Provinsi Jawa Barat	
8.	Peraturan Internal (<i>Hospital By Laws</i>) pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat	
9.	Peraturan Internal (<i>Hospital By Laws</i>) pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk Garut Provinsi Jawa Barat	



9E07A4DE00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9E07A4DE00>

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa	
10.	Peraturan Internal (<i>Hospital By Laws</i>) pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat		
11.	Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat		
12.	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat		
13.	Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Kinerja Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat		
14.	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat		
15.	Peta Jalan dan Rencana Aksi Daerah Upaya Kesehatan Penglihatan Provinsi Jawa Barat		
16.	Pedoman Pembentukan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur		Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
17.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
18.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usialanjut Usia		
19.	Pedoman Penyusunan Rencana Pelayanan Kepemudaan dan Organisasi Kepemudaan		
20.	Penyelenggaraan Kemitraan Kepemudaan		
21.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa		
22.	Instrumen Evaluasi Kapasitas Pemerintahan Daerah		
23.	Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pedoman Koordinasi Kerja sama Daerah		



9E07A4DE00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9E07A4DE00>

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
24.	Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa	
25.	Tata Kelola Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia Provinsi Jawa Barat	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
26.	Peraturan Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
Asisten Perekonomian dan Pembangunan		
27.	Tata Cara Usulan, Penilaian, Penetapan, dan Pencabutan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
28.	Pembinaan dan Pengawasan pada Badan Layanan Umum Daerah	
29.	Pedoman Kerja Sama dan Pembentukan Unit Usaha pada Badan Layanan Umum Daerah	
30.	Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat	
31.	Pengarusutamaan Kebudayaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
32.	Pusat Kesejahteraan Sosial/Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Daerah Provinsi Jawa Barat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
33.	Pengelolaan Barang Persediaan untuk Penanganan Sosial	
34.	Rencana Aksi Daerah untuk Penyandang Disabilitas	
35.	<i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan Tahun 2022-2045	
36.	Rencana Aksi Daerah Kelanjutusiaan Provinsi Jawa Barat	
37.	Badan Pengelolaan Cekungan Bandung	
38.	Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Daerah Provinsi Jawa Barat	
39.	Rencana Induk Pembangunan Pergaraman Daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat



9E07A4DE00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9E07A4DE00>

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
40.	Penyelenggaraan Penanganan Infrastruktur dan Peningkatan Sosial Ekonomi di Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat
41.	Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi pada Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jawa Barat	
42.	Pedoman Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
43.	Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	
44.	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
45.	Penyediaan Rumah Layak Huni	
46.	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Bidang Penataan Ruang	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat
47.	Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat	
48.	Peningkatan Pembangunan Jalan di Daerah Provinsi Jawa Barat	
49.	Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Barat	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
50.	Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Barat	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
51.	Perhitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
52.	Subsidi Bunga Kredit dan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Kecil di Daerah Provinsi Jawa Barat	
53.	Pengendalian Alih Fungsi Lahan	
54.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Swadaya Perkebunan, Penyuluh Swasta Perkebunan, Fasilitator Daerah Perkebunan, Pelaku Usaha Perkebunan, dan Tenaga Kerja Perkebunan	Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
55.	Pengembangan Usaha Kopi Tahun 2023-2027	
56.	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan	



No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
57.	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan	
58.	Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan	
59.	Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau bagi Petani Tembakau Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	
60.	Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat
61.	Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan	
62.	Tata Cara Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Umum Energi Daerah	
63.	Pengembangan Buah-buahan serta Sayuran Unggulan dan Prospektif di Daerah Provinsi Jawa Barat	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat
64.	Fasilitasi Asuransi Pertanian	
65.	Pembenihan Kentang Berkualitas di Jawa Barat	
66.	Kemitraan Pengelolaan Lahan antara Pihak Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan Petani Penggarap	
67.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura	
68.	Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	
69.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik Daerah	
70.	Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Padi dan Palawija	



9E07A4DE00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9E07A4DE00>

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
71.	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Padi dan Palawija	
72.	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Padi dan Palawija	
73.	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	
74.	Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	
75.	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	
76.	Masyarakat Hukum Adat	
Asisten Administrasi Umum		
77.	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026	
78.	Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat	
79.	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat	
80.	Transformasi Digital	
81.	Pengelolaan Pengaduan Berkadar Pengawasan pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	

Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Barat

Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat

Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat



9E07A4DE00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9E07A4DE00>

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
82.	Penggunaan, Pemeliharaan, dan Penyusutan Arsip Dinamis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat
83.	Pelaksanaan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
84.	Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	
85.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	
86.	Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	
87.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
88.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
89.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
90.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
91.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
92.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
93.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	



9E07A4DE00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9E07A4DE00>

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
94.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
95.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
96.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
97.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
98.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
99.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
100.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
101.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
102.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
103.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	



9E07A4DE00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9E07A4DE00>

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
104.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
105.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
106.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
107.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
108.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
109.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
110.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
111.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
112.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
113.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
114.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah,	



No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
	Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
115.	Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030	
116.	Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	
117.	Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	
118.	Tata Hubungan kerja/ Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	
119.	Hari Kerja dan Jam Kerja	
120.	Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
121.	Perubahan Kedua atas Pergub Nomor 55 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
122.	Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat	
123.	Perubahan Formulasi Bobot Penilaian Kinerja Jabatan Guru pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara	
124.	Sistem Pengembangan Kompetensi Terintegrasi pada Jawa Barat <i>Corporate University</i>	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat
125.	Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat
126.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
127.	Penilaian Barang Milik Daerah	
128.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
129.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan	



9E07A4DE00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9E07A4DE00>

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa	
	Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat	
130.	Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat		
131.	Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat		
132.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 110 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat		
133.	Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat		
134.	Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		
135.	Tata Cara Pemberian Gaji Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat		
136.	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025		
137.	Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi di Daerah Provinsi Jawa Barat		Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9E07A4DE00>

